

ANALISIS PIDANA HSL SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NARKOTIKA

Nama : Dinda Hari Oktaviana

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Pembimbing :

1. Dr. Suhartati S.H., M.Hum.
2. Peter Jeremias Setiawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang dan norma satu dengan norma lainnya. Penelitian hukum ini bertitik tolak dari telaah hukum positif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, peraturan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika. Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pertimbangan hakim dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Fakta-fakta yang diutamakan adalah, bahwa pelaku hanyalah korban dari penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti atau narkotika yang dipakai hanyalah sedikit, serta pelaku bukanlah seorang pengedar.

Kata kunci: *Narkotika, Rehabilitasi.*

CRIMINAL ANALYSIS OF HSL AS A CLASS I NARCOTIC USER IN ACCORDANCE WITH NARCOTICS LEGAL REGULATIONS

Name : Dinda Hari Oktaviana

Discipline / Study Program : Legal Studies / Law

Contributor :

1. Dr. Suhartati S.H., M.Hum.
2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia as a legal State based on Pancasila and the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia of 1945 has made rules governing the life of its people based on the law to create security and order, which the consequences of this above are all the actions and behaviors of all components of society must be in accordance with the applicable legal value. This legal research is a normative juridic, which is the type of research by reviewing facts against the Law and norms of one with the other norms. This legal research dotted from the review of positive law, namely by researching library materials or secondary data. Normative legal research includes research on legal principles, systematic law, legal regulations, comparative law, and legal history. Narcotics is a substance or drug derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can lead to decreased or alteration of consciousness, loss of taste, reducing pain relief, and may cause dependence, as provided in Article 1 Narcotics Act 1. Article 7 of the Narcotics Act specifies that: "Narcotics can only be used for the benefit of health services and/or the development of science and technology". The judge's consideration of applying rehabilitation measures against drug addicts is that the facts revealed at the trial are based on the testimony of witnesses and defendants and strengthened by laboratory examination. The facts that the perpetrator is only a victim of narcotics abuse with evidence or narcotics used are few, and the perpetrator is not a dealer.

Keywords: *Narcotics, Rehabilitation.*